

PROSEDUR WASKITA KARYA INFRASTRUKTUR BIDANG TATA KELOLA PERUSAHAAN

(PWKI – GCG)



KODE DAN NAMA DOKUMEN	PWKI-GCG- PROSEDUR WASKITA KARYA INFRASTRUKTUR BIDANG TATA KELOLA PERUSAHAAN	
REVISI	01	
EDISI	MARET 2023	
PENGENDALI	CORPORATE SECRETARY	
DITINJAU	MANAGEMENT REPRESENTATIVE	
DISETUJUI	PRESIDENT DIRECTOR	

TERKENDALI



PT WASKITA KARYA INFRASTRUKTUR

Gedung Waskita Rajawali Tower, Lt. 5. Jl. Soegija Pranata Kav. 12-13, Jatinegara, Jakarta-13330
Telp. (021) 8060 2821 Fax (021) 8060 2821 www.waskitakaryainfrastruktur.co.id



Corporate Office/~~Business Unit/Subsidiary~~ :

Halaman : 1 dari 1

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN

NAMA DOKUMEN : Prosedur Waskita Karya Infrastruktur Bidang Tata Kelola Perusahaan
KODE DOKUMEN : PWKI - GCG
TANGGAL EDISI PERTAMA : 11 Oktober 2019

NO REVISI	URAIAN SINGKAT REVISI DOKUMEN	TANGGAL REVISI
1.	Revisi dokumen sesuai dengan riwayat perubahan sejarah prosedur	10 April 2023

PENERIMA DOKUMEN			TANGGAL TERIMA
NO	UNIT KERJA	SALINAN DOKUMEN	
1.	Risk Management & System Manager	Hardcopy	10 April 2023
2.	Seluruh Karyawan	Softcopy	10 April 2023

Jakarta, 10 April 2023
Pengendali Dokumen,

(Dwi Dian Oktaviani)

KEPUTUSAN BOARD OF DIRECTOR PT WASKITA KARYA INFRASTRUKTUR
NOMOR: 13 /SK/WKI/2023
TENTANG
PENETAPAN PROSEDUR BIDANG TATA KELOLA PERUSAHAAN

BOARD OF DIRECTOR PT WASKITA KARYA INFRASTRUKTUR

Menimbang:

1. Bahwa, telah ditetapkan Prosedur PT Waskita Karya Infrastruktur bidang Tata Kelola Perusahaan sesuai Surat Keputusan Board of Director PT Waskita Karya Infrastruktur Nomor : 7.1/SK/WKI/2019 tanggal 11 Oktober 2019;
2. Bahwa telah ditetapkan Struktur Organisasi Perusahaan PT Waskita Karya Infrastruktur, sesuai Keputusan Direksi PT Waskita Karya Infrastruktur Nomor: 31/SK/WKI/2022 tanggal 29 Desember 2022;
3. Bahwa saat ini perusahaan mengacu pada standar ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 37001:2016, Perkap No. 24 thn 2007;
4. Bahwa sehubungan dengan butir 1 s.d. 3 di atas perlu Penetapan Prosedur Bidang Tata Kelola Perusahaan dengan Keputusan Board of Director.

Mengingat:

1. Undang – undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang – undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang – undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal;
4. Akta Pendirian PT. Waskita Karya Infrastruktur (d/h PT. Waskita Karya Energi) Nomor 15 April 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, SH. Mkn. Notaris di Jakarta SK Menteri Hukum dan HAM AHU-0019486.AH.01.01 Tahun 2016. Beserta segala perubahan nya, dengan Perubahan akta terakhir nomor 109 Tanggal 26 Februari 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Yose Dima Satria SH. Mkn. Notaris di Jakarta, di sahkan oleh SK Menteri Hukum dan HAM No. AHU-00110491AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 26 Februari 2019;
5. Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT Waskita Karya Infrastruktur, sesuai Akta No: 01 Tanggal 05 April 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Varinia, SH. Notaris di Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Menyatakan tidak berlaku lagi Prosedur Waskita bidang Tata Kelola Perusahaan sesuai keputusan Board of Director Nomor : 7.1/SK/WKI/2019 tanggal 11 Oktober 2019
- Kedua : Prosedur Waskita bidang Tata Kelola Perusahaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini untuk diketahui, dipahami, ditaati, dan dilaksanakan oleh semua jajaran pegawai dilingkungan Perusahaan
- Ketiga : Pengendali Prosedur tersebut adalah Corporate Secretary;

96 

Lampiran Keputusan Direksi PT Waskita Karya Infrastruktur

Nomor : 13 /SK/WKI/2023

Tanggal : 10 April 2023

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau atau disesuaikan billamana terjadi Perubahan kebijaksanaan Perusahaan maupun perkembangan lingkungan usaha dikemudian hari.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 10 April 2023

President Director,



Oktarina Kartika Ayu

Distribusi: Menyeluruh

96

**PERUBAHAN PROSEDUR WASKITA KARYA INFRASTRUKTUR
 BIDANG TATA KELOLA PERUSAHAAN
 EDISI OKTOBER 2019 – MARET 2023**

NO	URAIAN/ KODE DOKUMEN	PW GCG EDISI OKTOBER 2019	PW GCG EDISI MARET 2023
Prosedur Waskita Karya Infrastruktur Bidang Tata Kelola Perusahaan			
1	Cover	Nama Prosedur: PWKI-GCG Revisi: 0 Edisi: Oktober 2019 Pengendali: Corporate Secretary Ditinjau: Corporate Secretary Manager Disetujui : President Director	Nama Prosedur: PWKI-KPM Revisi: 01 Edisi: Februari 2023 Pengendali: Corporate Secretary Ditinjau: Corporate Secretary Manager Disetujui : President Director
2	Visi dan Misi	1. Visi: Menjadi Perusahaan Terkemuka di Bidang Infrastruktur dan Energi Terbarukan di Indonesia. 2. Misi: Meningkatkan Nilai Perusahaan yang berkelanjutan melalui: a. Menyediakan Infrastruktur yang handal dan Pembangkit energi yang ramah lingkungan b. Menegakkan profesionalisme dengan mengedepankan prinsip-prinsip GCG; c. Mengutamakan keselamatan, efisien dan kualitas; dan d. Bersinergi dengan mitra yang kompeten.	1.1. Visi: Menjadi Perusahaan terdepan dan terpercaya di bidang Investasi Energi Baru Terbarukan dan Infrastruktur yang berkelanjutan di Indonesia. 1.2. Misi: a. Melakukan ekspansi dan penguatan layanan di sektor energi baru terbarukan dan infrastruktur berkelanjutan. b. Meningkatkan daya saing dengan peningkatan kapabilitas SDM, finansial dan sistem digitalisasi terintegrasi. c. Menerapkan profesionalisme yang berdasarkan QHSE (<i>Quality, Health, Safety, Environment</i>) dan manajemen resiko dengan mengedepankan prinsip-prinsip GCG (<i>Good Corporate Governance</i>). d. Memperluas sinergi dengan mitra strategis perusahaan.

NO	URAIAN/ KODE DOKUMEN	PW GCG EDISI OKTOBER 2019	PW GCG EDISI MARET 2023
3	Nilai Budaya	IPTEX	AKHLAK
4	1.2. Ruang Lingkup	Corporate Office, Business Unit dan Project	Beserta Anak Perusahaan
5	1.4 Referensi		Menambahkan: 1. Anggaran Dasar PT Waskita Karya Infrastruktur Nomor 2 Tanggal 14 Juli 2022 2. ISO-9001:2015 Sistem Manajemen Mutu, ISO-14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan, ISO-45001:2018 Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja 3. ISO 37001:2016 Klausul 5.2 Kebijakan Anti Penyuapan 4. ISO 37001:2016 Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional 5. ISO 37001:2016 Klausul 8.6 Komitmen Anti Penyuapan 6. ISO 37001:2016 Klausul 8.9 Meningkatkan Kepedulian
6	Organ Perusahaan 3.1 Rapat Umum Pemegang Saham	3.2.2 Rapat Umum Pemegang Saham 3.2.2.1 Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham 3.2.2.1.1 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 3.2.2.1.2 Board of Director 3.2.2.1.3 Board of Commissioners 3.2.2.2 Jenis Rapat 3.2.2.2.1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 3.2.2.2.2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) 3.2.2.3 Undangan RUPS dan RUPSLB 3.2.2.4 Risalah RUPS	5.2.1. Rapat Umum Pemegang Saham a. Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) b. Jenis Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 1) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) 2) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) c. Hak Pemegang Saham d. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham e. Kuorum, Hak suara dan Keputusan RUPS f. Risalah RUPS

NO	URAIAN/ KODE DOKUMEN	PW GCG EDISI OKTOBER 2019	PW GCG EDISI MARET 2023
7	Organ Perusahaan 3.2 Board of Commissioners	3.3 Board of Commissioners 3.3.1 Tugas, Kewajiban, Wewenang, Tanggung Jawab dan Hak Board of Commissioners 3.3.2 Keanggotaan Board of Commissioners 3.3.3 Komposisi 3.3.4 Persyaratan Anggota Board of Commissioners 3.3.5 Standar Penilaian Kinerja Board of Commissioners 3.3.6 Mekanisme Rapat Board of Commissioners 3.3.7 Independensi dan Benturan Kepentingan 3.3.8 Pelaporan	5.2.2. Board of Commissioners a. Tugas Board of Commissioners b. Kewajiban Board of Commissioners c. Wewenang Board of Commissioners d. Tanggungjawab Board of Commissioner e. Hak Board of Commissioner f. Komposisi Board of Commissioner g. Persyaratan Anggota Board of Commissioner h. Standar Penilaian Kinerja Board of Commissioner i. Rapat Board of Commissioner j. Pelaporan k. Independensi dan Benturan Kepentingan l. Hubungan Kerja Board of Commissioner dan Board of Director
8	Organ Perusahaan 3.3 Board of Director	3.5 Board of Director 3.5.1 Tugas, Kewajiban, Wewenang, Tanggung jawab dan Hak Board of Director 3.5.2 Persyaratan Director 3.5.3 Mekanisme Rapat Board of Director	5.2.3. Board of Director a. Tugas Board of Director b. Kewajiban Board of Director c. Wewenang Board of Director d. Tanggung Jawab Board of Director e. Hak Board of Director f. Komposisi Board of Director g. Persyaratan Board of Director h. Standar Penilaian Kinerja Board of Director i. Rapat Board of Director

NO	URAIAN/ KODE DOKUMEN	PW GCG EDISI OKTOBER 2019	PW GCG EDISI MARET 2023
			j. Risalah Board of Director
9	Organ Perusahaan 3.4 Audit Committee	3.4 Komite-Komite 3.4.1 Komite Audit 3.4.2 Komite Pemantau Manajemen Risiko 3.4.3 Piagam Komite 3.4.4 Hubungan Kerja Board of Commissioners dengan Board of Director	5.2.4. Audit Committee a. Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab Audit Committee b. Wewenang Audit Committee
10	Organ Perusahaan 3.5 Corporate Secretary	3.6 Corporate Secretary 3.6.1 Fungsi dan Peran SVP Corporate Secretary 3.6.2 Kualifikasi untuk Corporate Secretary 3.6.3 Tugas dan Tanggung Jawab Corporate Secretary 3.6.4 Hubungan Kerja 3.6.4.1 Hubungan dengan Board of Commissioners dan Board of Director 3.6.4.2 Hubungan dengan Pemegang Saham 3.6.4.3 Hubungan dengan stakeholder lainnya	5.2.5. Corporate Secretary a. Fungsi, Tugas dan Tanggungjawab Corporate Secretary b. Kualifikasi untuk Corporate Secretary c. Hubungan Kerja Corporate Secretary
11	Organ Perusahaan 3.6 Secretary Board of Commissioner		5.2.6. Secretary Board of Commissioner
12	Organ Perusahaan 3.7 Internal Audit	3.7 Internal Audit 3.7.1 Fungsi dan Peran Internal Audit 3.7.2 Kualifikasi untuk Internal Audit 3.7.3 Tugas dan Wewenang Internal Audit 3.7.4 Hubungan Kerja Internal Audit	5.2.7. Internal Audit a. Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab Internal Audit b. Wewenang Internal Audit c. Kualifikasi Internal Audit 1) Transparansi dan Disclosure

NO	URAIAN/ KODE DOKUMEN	PW GCG EDISI OKTOBER 2019	PW GCG EDISI MARET 2023
			2) Prinsip Dasar Transparansi dan Disclosure 3) Media Informasi 4) Benturan Kepentingan 5) Hubungan dengan Pegawai 6) Hubungan dengan Pemberi Kerja 7) Hubungan dengan Pemegang Obligasi 8) Hubungan dengan Lingkungan dan Masyarakat 9) Hubungan dengan Pejabat Negara
13	Kebijakan Perusahaan 4.1 Transparansi dan Disclosure		5.3.1. Transparansi dan Disclosure a. Prinsip dasar transparansi dan disclosure b. Media informasi 5.3.2. Benturan Kepentingan 5.3.3. Hubungan dengan Pegawai 5.3.4. Hubungan dengan Pemberi Kerja 5.3.5. Hubungan dengan Pemegang Obligasi 5.3.6. Hubungan dengan Lingkungan dan Masyarakat 5.3.7. Hubungan dengan Pejabat Negara
14	Penerapan dan Pelanggaran Pedoman Tata Kelola Perusahaan		

DAFTAR ISI

COVER.....	i
SURAT KEPUTUSAN (SK) DIREKSI.....	ii
RIWAYAT PERUBAHAN PROSEDUR	iii
DAFTAR ISI.....	vii
1. TUJUAN	1
1.1. VISI	2
1.2. MISI	2
1.3. NILAI BUDAYA PERUSAHAAN	2
2. RUANG LINGKUP.....	3
3. DEFINISI.....	3
4. REFERENSI.....	4
5. DETAIL PROSEDUR	5
5.1. LIMA ASAS GOOD CORPORATE GOVERNANCE	5
5.2. HUBUNGAN ANTAR ORGAN PERUSAHAAN	6
6. AUDIT COMMITTEE	21
7. CORPORATE SECRETARY.....	22
8. SECRETARY BOARD OF COMMISSIONER	23
9. INTERNAL AUDIT	24
10. KEBIJAKAN PERUSAHAAN.....	26
10.1 TRANSPARANSI DAN DISCLOSURE	26
10.2 BENTURAN KEPENTINGAN	27
11. HUBUNGAN DENGAN PEGAWAI	32
11.1 HUBUNGAN DENGAN PEMBERI KERJA	33
11.2 HUBUNGAN DENGAN PEMEGANG OBLIGASI	33
11.3 HUBUNGAN DENGAN LINGKUNGAN MASYARAKAT	33
11.4 HUBUNGAN DENGAN PEJABAT NEGARA.....	34
12. PENERAPAN DAN PELANGGARAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN	34